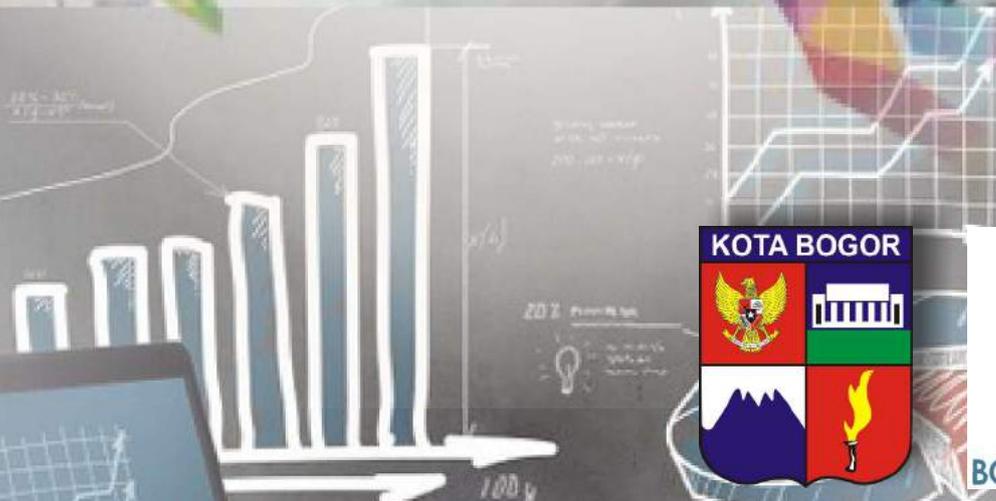


# RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



Jl. Pahlawan Blk 144,  
Kec. Bogor Selatan,  
Kota Bogor



Telp. (0251) 8313274,  
Fax. (0251) 8373229

# INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

# KATA PENGANTAR

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional Di Lingkungan Inspektorat Daerah, kami susun Rencana Kerja (Renja) ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan secara konsisten oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 ini disusun. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin..

Bogor, \_\_\_\_\_ Desember 2019M  
Jumadil Awal 1441H

**INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR.**



**Drs. Pupung W. Purnama, M.Si**  
Pembina Tk. I / IV-b  
NIP. 19700715 199009 1 002

# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU</b> .....	<b>13</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	32
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>33</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	33
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	37
3.2.1. Tujuan.....	37
3.2.2. Sasaran.....	37
3.3. Program dan Kegiatan .....	39
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT         DAERAH</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>

# DAFTAR TABEL

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	(TABEL T-C.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 -----	15
Tabel 2.2.	(TABEL T-C.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR-----	19
Tabel 2.4.	(TABEL T-C.31) REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	22
Tabel 3.3.	(TABEL T-C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR -----	40
Tabel 4.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020 -----	47
Tabel 4.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS -----	53

# BAB I

# PENDAHULUAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kota Bogor kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 kewajiban Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor, sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor, dimana Rencana Strategis Inspektorat

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Daerah Kota Bogor dalam bidang pengawasan menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor pada dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Kualitas dokumen rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana kerja merupakan cerminan kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun penjabaran dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2024 berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Bogor mengusulkan anggaran pada APBD Kota Bogor di Tahun 2020 untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Urusan Pengawasan sebesar Rp.14.946.841.000,00,- yang terdiri atas 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

- Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024;
  24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 55 Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2019 – 2024
  25. Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional Di Lingkungan Inspektorat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 dimaksudkan sebagai dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah dalam satu tahun ke depan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2020 adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Terwujudnya aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) atau tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) atau tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;  
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN**

# **RENJA PD TAHUN LALU**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

#### 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) atau tahun 2019 Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah / RENSTRA Periode 2019-2024 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat Daerah melaksanakan program dan kegiatannya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 pada umumnya realisasi program / kegiatan telah tercapai sesuai dengan target

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program / kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHI dalam indikator Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 ini dalam perumusannya mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun lalu dan capaian Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan capaian renstra sebelumnya tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel berikut :

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tabel 2.1. (TABEL T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

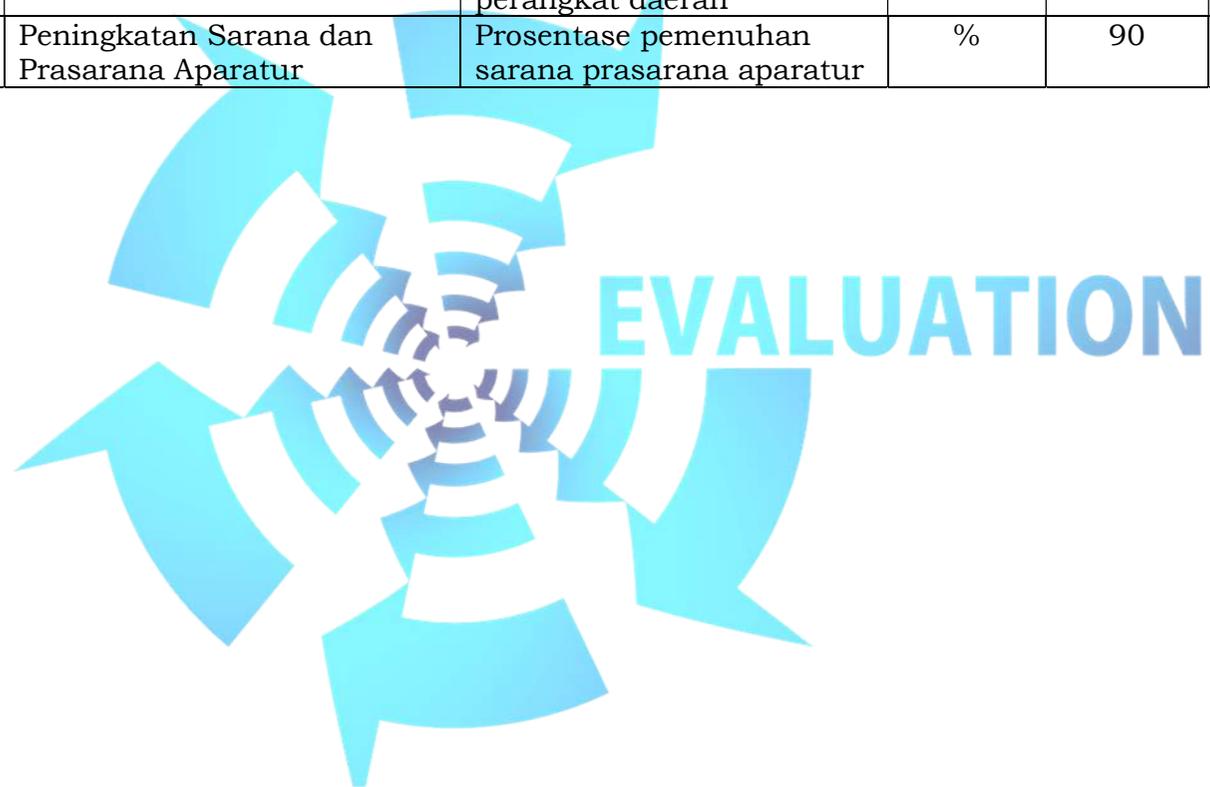
No	MISI	No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
1	Misi 5 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan	1	<b>Tujuan 1</b>					
			Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik secara prima					
			<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	Level	3	3	100,00
				Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	SKPD	2	0	0
			<b>Program</b>					
			Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	level maturitas penerapan SPIP	Level	3	3	100,00
				penetapan PD berpredikat WBK	PD	3	0	0
			<b>Sasaran 2</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Tingkat / Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100
				Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	A	A	100
		Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	%	65	100	153,85		
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Opini	WTP	WTP	100		

RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
			<b>Program</b>					
		1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00
				tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	%	100	100	100,00
				opini BPK atas LKPD kota bogor	Opini	WTP	WTP	100,00
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat kota Bogor)(%)	%	100	100	100,00
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	%	74	93,79	126,74
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	%	89	100	112,36
				tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit		0	0	100,00
		2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporanoran Capaian Kinerja dan Keuangan	hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	%	65	97,3	149,69
		3	Peningkatan Pengembangan	Nilai LAKIP perangkat	Point	84	81,76	97,33

RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN
			Sistem Pelaporanoran Capaian Kinerja dan Keuangan	daerah				
				Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		4	Pelayanan Administrasi Pekantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	90	90	100
		5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	90	90	100



Dari tabel di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan Program dan tahun 2019, rata-rata pencapaian kinerja sebesar 100%. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kota Bogor, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- c. Adanya kerjasama yang baik dari PD terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- d. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah PD yang diawasi.
- b. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan PD belum optimal.

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Penyajian tabel Hasil Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2. (TABEL T-C.30)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019 (Thn n-2)	TAHUN 2020 (Thn n-1)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)	TAHUN 2019 (Thn n-2)	TAHUN 2020 (Thn n-1)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM										
D.	FOKUS PENUNJANG URUSAN										
5	BIDANG URUSAN PENGAWASAN										

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2019 (Thn n-2)	TAHUN 2020 (Thn n-1)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)	TAHUN 2019 (Thn n-2)	TAHUN 2020 (Thn n-1)	TAHUN 2021 (Thn n)	TAHUN 2022 (Thn n+1)
	<b>INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH :</b>										
1	Persentase pelanggaran pegawai			7,00%	7,50%	5,00%	2,50 %	8,40%	N/A	5,00 %	2,50 %
2	Persentase tindak lanjut temuan internal			100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal			100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP			70,00%	72,50%	75,00 %	77,5 0%	70,00 %	72,5 0%	75,0 0%	77,5 0%

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor, sebagai satusatunya perangkat daerah dalam bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Bogor memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk isuisu penting yang terjadi yaitu masih tingginya tingkat penyimpangan dan penyalahgunaan atas ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah (PD).

Walaupun seluruh temuan dapat ditindaklanjuti, namun temuan berulang selalu terjadi sehingga Inspektorat Daerah Kota Bogor perlu meningkatkan lagi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada PD dengan menekankan pada *reward and punishment* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
- b. Terjalinnnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.
- c. Terjalinnnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern
- d. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan PD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor akan manfaat pembinaan dan pengawasan.
- e. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- f. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, terdapat perbedaan besaran pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dikarenakan perhitungan ulang demi tercapainya target kinerja sesuai dengan Restra.

Perbandingan pagu indikatif antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sebagaimana tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tabel 2.4. (TABEL T-C.31)

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>						
	<b>BIDANG URUSAN PENGAWASAN</b>			15.312.000.000	<b>BIDANG URUSAN PENGAWASAN</b>			2.819.216.000			
	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>			<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>					
	<b>Program 1.1.2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana PD</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>12.400.000.000</b>	<b>Program 1.1.2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana PD</b>	<b>80</b>	<b>%</b>	<b>604.960.000</b>	
	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>			<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>					
	Kegiatan 1.1.2.1 : Pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah Inventaris kantor yang disediakan	10	Paket	500.000.000	Kegiatan 1.1.2.1 : Pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah Inventaris kantor yang disediakan	10	Paket	216.960.000	Penyesuaian kebutuhan dengan rencana pemindahan kantor
		Pendingin Ruangan (AC)	3	Unit			Pendingin Ruangan (AC)	3	Unit		
		Kursi Sice	1	Unit			Kursi Sice	1	Unit		
		Front Office Kit	1	Paket			Front Office Kit	1	Paket		
		Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit			Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit		
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit			Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit		
		Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit			Lemari Buku Pejabat Eselon II	1	Unit		
		Kamera DSLR	1	Unit			Kamera DSLR	1	Unit		
		Microphone Meja Wireless Set	1	Paket			Microphone Meja Wireless Set	1	Paket		

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Alat Ukur Jarak Digital	2 Unit			Alat Ukur Jarak Digital	2 Unit			
		Sigmat Digital	2 Unit			Sigmat Digital	2 Unit			
		Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet)	1 Unit			Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet)	1 Unit			
		Sound system Rapat	1 Unit			Sound system Rapat	1 Unit			
		Papan Nama Instansi	2 Unit			Papan Nama Instansi	2 Unit			
	Kegiatan 1.1.2.2 : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jumlah Barang Inventaris kantor yang dipelihara	7 Paket	200.000.000	Kegiatan 1.1.2.2 : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jumlah Barang Inventaris kantor yang dipelihara	7 Paket	388.000.000	Penyesuaian kebutuhan dengan rencana pemindahan kantor	
		Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat				Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat	100 %			
		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit			Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit			
		Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit			Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4	10 Unit			
		Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11 Unit			Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2	11 Unit			
		Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit			Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit			

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit			Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit			
		Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit			Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit			
		Belanja Pemeliharaan Sound System	6 Unit			Belanja Pemeliharaan Sound System	6 Unit			
		Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit			Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit			
		Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit			Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit			
		Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit			Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit			
		Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set			Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set			
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung			Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung			
		Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set			Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set			
	Kegiatan 1.1.2.3 : Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor	Terbangunnya gedung kantor Inspektorat Kota Bogor	1 Unit	11.700.000.000	Kegiatan 1.1.2.3 : Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor	Terbangunnya gedung kantor Inspektorat Kota Bogor	0 Unit	-	Batal, tidak jadi dilaksanakan	
	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>			<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				
	<b>Program 1.1.3 : Pengembangan Data dan Informasi</b>	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55 %	<b>125.000.000</b>	<b>Program 1.1.3 : Pengembangan Data dan Informasi</b>	Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik	55 %	<b>118.815.000</b>		
		Prosentase data dan Informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55 %			Prosentase data dan Informasi pembangunan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik	55 %			

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi sesuai Kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90 %			Persentase Ketersediaan Data dan Informasi sesuai Kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	90 %			
	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>			<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>				
	Kegiatan 1.1.3.1 : Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	125.000.000	Kegiatan 1.1.3.1 : Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	118.815.000	Penyesuaian kebutuhan anggaran	
		Pengembangan website Inspektorat	1 Kali			Pengembangan website Inspektorat	1 Kali			
	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>			<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				
	<b>Program 1.1.4 : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	<b>1.750.000.000</b>	<b>Program 1.1.4 : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	<b>1.519.025.000</b>		
	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>			<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>				
	Kegiatan 1.1.4.1 : Pengelolaan Rumah tangga PD	Terpenuhinya kebutuhan pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 %	1.750.000.000	Kegiatan 1.1.4.1 : Pengelolaan Rumah tangga PD	Terpenuhinya kebutuhan pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 %	1.519.025.000	Penyesuaian kebutuhan dengan rencana pemindahan kantor	
		Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan				Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		
		Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 Bulan				Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 Bulan		
		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan				Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Catatan Penting	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12	Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12	Bulan	
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12	Bulan		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12	Bulan	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12	Bulan	
		Belanja Bahan bakar Minyak/ Gas	12	Bulan		Belanja Bahan bakar Minyak/ Gas	12	Bulan	
		Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12	Bulan		Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12	Bulan	
		Belanja Telepon	12	Bulan		Belanja Telepon	12	Bulan	
		Belanja Air	12	Bulan		Belanja Air	12	Bulan	
		Belanja Listrik	12	Bulan		Belanja Listrik	12	Bulan	
		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12	Bulan		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12	Bulan	
		Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12	Bulan		Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12	Bulan	
		Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12	Bulan		Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12	Bulan	
		Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12	Bulan		Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12	Bulan	
		Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12	Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12	Bulan	
		Belanja Cetak dan Penggandaan	12	Bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan	

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
		Belanja makanan dan Minuman Tamu	12	Bulan		Belanja makanan dan Minuman Tamu	12	Bulan			
		Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ seminar/lokakarya	12	Bulan		Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ seminar/lokakarya	12	Bulan			
		Belanja Pakaian Kerja	4	Stel		Belanja Pakaian Kerja	4	Stel			
		Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan		Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan			
		Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12	Bulan		Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12	Bulan			
		Belanja Tenaga Ahli	12	Bulan		Belanja Tenaga Ahli	12	Bulan			
	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				
	<b>Program 1.2.1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1. Opini BPK	WTP	Opini	<b>125.000.000</b>	<b>Program 1.2.1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	1. Opini BPK	WTP	Opini	<b>20.800.000</b>	
		2. Persentase PD yang dilakukan pengawasan	100	%	<b>220.000.000</b>			2. Persentase PD yang dilakukan pengawasan	100	%	<b>132.550.000</b>
		3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	%				3. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	%	
		4. Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100	%				4. Persentase rekomendasi temuan BPK dan APIP yang ditindaklanjuti	100	%	
		5. Level Maturitas SPIP	2	Level	<b>200.000.000</b>			5. Level Maturitas SPIP	2	Level	<b>107.640.000</b>
		6. Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	45,9	%				6. Persentase Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	45,9	%	

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			
		7. Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun / diupdate	3	Elemen	350.000.000		7. Jumlah Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibangun / diupdate	3	Elemen	91.022.000	
		8. Jumlah Diklat, Bimtek, Sosialisasi, PPSDAM	8	Angka			8. Jumlah Diklat, Bimtek, Sosialisasi, PPSDAM	8	Angka		
		7. Jumlah PD berpredikat WBK	1	PD	84.000.000		7. Jumlah PD berpredikat WBK	1	PD	185.460.000	
	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>				<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>				
	Kegiatan 1.2.1.1 : Penerapan SPIP	Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3	Level	200.000.000	Kegiatan 1.2.1.1 : Penerapan SPIP	Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3	Level	107.640.000	Pengurangan akibat dihapusnya anggaran perjadi dan honorarium
		FGD Peningkatan SPIP	1	kali			FGD Peningkatan SPIP	1	kali		
		Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1	kali			Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1	kali		
		Survey kepuasan stakeholder	1	kali			Survey kepuasan stakeholder	1	kali		
		Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4	kali			Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4	kali		
		Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkata daerah	36	PD			Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkata daerah	36	PD		
		Tim satgas SPIP Kota Bogor	15	Orang			Tim satgas SPIP Kota Bogor	15	Orang		
	Kegiatan 1.2.1.2 : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Monitoring	2	Lap	125.000.000	Kegiatan 1.2.1.2 : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Monitoring	2	Lap	20.800.000	Pengurangan akibat dihapusnya anggaran perjadi dan honorarium
		Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	5	Buku			Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	5	Buku		
		Pendampingan Reviu	2	Kali			Pendampingan Reviu	2	Kali		
		Buku Laporan Hasil	8	Buku			Buku Laporan Hasil	8	Buku		

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Reviu LKPD				Reviu LKPD				
	Kegiatan 1.2.1.3 : Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan kinerja	8 PD	220.000.000	Kegiatan 1.2.1.3 : Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan kinerja	8 PD	132.550.000	Pengurangan akibat dihapusnya anggaran perjadi dan honorarium	
		Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan tujuan tertentu / probity audit	8 PD			Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan tujuan tertentu / probity audit	8 PD			
		Jumlah PD yang di lakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 PD			Jumlah PD yang di lakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 PD			
		Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi	3 Lap			Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi	3 Lap			
		Jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Menpan, Mendagri	12 PD			Jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Menpan, Mendagri	12 PD			
		Jumlah PD yang di lakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar)	37 PD			Jumlah PD yang di lakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar)	37 PD			

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali			
		Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pema ntaua n TL			Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pema ntaua n TL			
	Kegiatan 1.2.1.4 :Peningkatan Kapabilitas APIP	1. Terlaksananya Bimtek	2 Kali	350.000.000	Kegiatan 1.2.1.4 :Peningkatan Kapabilitas APIP	1. Terlaksananya Bimtek	2 Kali	91.022.000	Pengurangan akibat dihapusnya anggaran perjadi dan honorarium	
		2. Terlaksananya PPSDAM	9 Kali			2. Terlaksananya PPSDAM	9 Kali			
	Kegiatan 1.2.1.5 : Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1. Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	37 PD	84.000.000	Kegiatan 1.2.1.5 : Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1. Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	36 PD	185.460.000	Pengurangan akibat dihapusnya anggaran perjadi dan honorarium	
		2. Terlaksananya monitoring RADPPK	4 Kali			2. Terlaksananya monitoring RADPPK	4 Kali			
		3. Terlaksananya penilaian internal ZI	1 Kali			3. Terlaksananya penilaian internal ZI	1 Kali			
		4. Terlaksananya penanganan pengendalian grafifikasi, WBS, benturan kepentingan	3 Lap			4. Terlaksananya penanganan pengendalian grafifikasi, WBS, benturan kepentingan	3 Kali			
		5. Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	1,2 Kali			5. Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2 Kali			
		6. Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	2,1 Kali			6. Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	1 Kali			
	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>			<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>				

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)		
	<b>Program 1.2.2 : Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	67,5 6 %	<b>58.000.000</b>	<b>Program 1.2.2 : Penerapan Reformasi Birokrasi</b>	Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"		<b>38.944.000</b>		
	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>			<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>				
	Kegiatan 1.2.2.1 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya reviu laporan kinerja	1 PD	58.000.000	Kegiatan 1.2.2.1 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya reviu laporan kinerja	1 PD	38.944.000	Penyesuaian pencapaian target	
		2. Jumlah PD yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 PD			2. Jumlah PD yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 PD			
		3. Jumlah Monitoring Kinerja	36 PD			3. Jumlah Monitoring Kinerja	36 PD			
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>15.312.000.000</b>				<b>2.819.216.000</b>		

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Inspektorat Daerah Kota Bogor tidak secara khusus melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan audit reguler pada Kecamatan beserta Kelurahanannya, Inspektorat Daerah Kota Bogor menelaah kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dengan membandingkan antara proposal masyarakat yang disetujui dengan hasil pelaksanaan kegiatannya.

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota / Kabupaten adalah sebagai berikut:

##### A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkahlangkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakantindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

##### 1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:

- a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
- c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
- d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;  
dan
- e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.

##### 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah / Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:

- a. pengelolaan persediaan;

- b. pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
- c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
- e. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- g. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- h. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.

3. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:

- a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

**B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- 1. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2. Penyalahgunaan wewenang;
- 3. Hambatan dalam pelayanan publik;
- 4. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan

atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
7. Penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen / laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
  3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ; dan
  4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
    - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
    - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
    - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
    - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
    - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (joint audit) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama / Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota, dengan fokus:
1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
  2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
  3. Pengawasan Bidang Perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;l;
  2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
  3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
  4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
  5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagai satu satunya perangkat daerah bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendukung Visi Kota Bogor “Terwujudnya Kota Bogor Yang Ramah Keluarga”, maka dalam rangka mencapai visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun misi Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu Misi 2 : “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”,

#### **3.2.1. Tujuan**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

#### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada masing-masing sasaran terdapat indikator untuk mengukur sasaran yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan inspektorat, dengan indikator :

- Nilai AKIP Inspektorat
- Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat
- Level kapabilitas APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah, dengan indikator :

- Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal BB
- Level Maturitas SPIP
- Prosentase perangkat daerah yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material
- Jumlah PD Berpredikat WBK

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi

yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang dipedomani dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Hal-hal penting yang harus disiapkan dalam membuat kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Serangkaian kebijakan ditetapkan sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Inspektorat Daerah Kota Bogor mengusulkan anggaran pada APBD Kota Bogor di Tahun 2020 untuk Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Urusan Pengawasan yang terdiri atas 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan, dengan total kebutuhan dana / pagu indikatif anggaran sebesar Rp.2.819.216.000,-. Rekapitulasi usulan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Tabel 3.3. (TABEL T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
<b>402,02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>						
402.40201.02.001	Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor	Jumlah Inventaris kantor yang disediakan	10 Paket	216.960.000	Jumlah Inventaris kantor yang disediakan	0 Paket	-
		Pendingin Ruangan (AC)	3 Unit		Pendingin Ruangan (AC)	0 Unit	
		Kursi Sice	1 Unit		Kursi Sice	0 Unit	
		Front Office Kit	1 Paket		Front Office Kit	0 Paket	
		Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit		Meja Kerja Pejabat Eselon II	0 Unit	
		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit		Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0 Unit	
		Lemari Buku Pejabat Eselon II	1 Unit		Lemari Buku Pejabat Eselon II	0 Unit	
		Kamera DSLR	1 Unit		Kamera DSLR	0 Unit	
		Microphone Meja Wireless Set	1 Paket		Microphone Meja Wireless Set	0 Paket	
		Alat Ukur Jarak Digital	2 Unit		Alat Ukur Jarak Digital	0 Unit	
		Sigmat Digital	2 Unit		Sigmat Digital	0 Unit	
		Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet)	1 Unit		Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet)	0 Unit	
		Sound system Rapat	1 Unit		Sound system Rapat	0 Unit	
		Papan Nama Instansi	2 Unit		Papan Nama Instansi	0 Unit	
402.40201.02.006	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	Jumlah Barang Iventaris kantor yang dipelihara	7 Paket	388.000.000	Jumlah Barang Iventaris kantor yang dipelihara	0 Paket	-

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
		Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat	100 %		Terpeliharanya Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat	0 %	
		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	10 Unit		Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4	0 Unit	
		Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 4	10 Unit		Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 4	0 Unit	
		Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 2	11 Unit		Belanja STNK Kendaraaan Bermotor Roda 2	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan AC	13 Unit		Belanja Pemeliharaan AC	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	11 Unit		Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	1 Unit		Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Sound System	6 Unit		Belanja Pemeliharaan Sound System	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Komputer	16 Unit		Belanja Pemeliharaan Komputer	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Laptop	27 Unit		Belanja Pemeliharaan Laptop	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan Printer	22 Unit		Belanja Pemeliharaan Printer	0 Unit	
		Belanja Pemeliharaan CCTV	1 Set		Belanja Pemeliharaan CCTV	0 Set	

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Gedung		Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Gedung	
		Belanja Operasional Jaringan Listrik	1 Set		Belanja Operasional Jaringan Listrik	0 Set	
402.40201.02.022	Kegiatan Pembangunan Gedung Inspektorat Kota Bogor	Terbangunnya gedung kantor Inspektorat Kota Bogor	0 Unit	-	Terbangunnya gedung kantor Inspektorat Kota Bogor	0 Unit	-
<b>403,18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>						
403.40201.18.006	Kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	118.815.000	Pengembangan SIM HP dalam penilaian PAK-JFA	2 Kali	118.815.000
		Pengembangan website Inspektorat	1 Kali		Pengembangan website Inspektorat	1 Kali	
<b>402,01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
402.40201.01.001	Kegiatan Pengelolaan Rumah tangga PD	Terpenuhinya kebutuhan pegawai Inspektorat Kota Bogor	100 %	1.519.025.000	Terpenuhinya kebutuhan pegawai Inspektorat Kota Bogor	0 %	
		Honorarium Pelaksana Kegiatan	12 Bulan		Honorarium Pelaksana Kegiatan	0 Bulan	
		Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	12 Bulan		Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa	0 Bulan	
		Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan		Belanja Alat Tulis Kantor	0 Bulan	
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan		Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0 Bulan	
		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12 Bulan		Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	0 Bulan	
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0 Bulan	
		Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	12 Bulan		Belanja Bahan bakar Minyak/Gas	0 Bulan	

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
		Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	12 Bulan		Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	0 Bulan	
		Belanja Telepon	12 Bulan		Belanja Telepon	0 Bulan	
		Belanja Air	12 Bulan		Belanja Air	0 Bulan	
		Belanja Listrik	12 Bulan		Belanja Listrik	0 Bulan	
		Belanja Surat Kabar/ Majalah	12 Bulan		Belanja Surat Kabar/ Majalah	0 Bulan	
		Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	12 Bulan		Belanja jasa tenaga administrasi perkantoran	0 Bulan	
		Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	12 Bulan		Belanja jasa kebersihan dan tenaga pembersih	0 Bulan	
		Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	12 Bulan		Belanja jasa keamanan dan tenaga keamanan	0 Bulan	
		Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	12 Bulan		Belanja Bahan Bakar Minyak/ gas dan Pelumas	0 Bulan	
		Belanja Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		Belanja Cetak dan Penggandaan	0 Bulan	
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0 Bulan	
		Belanja makanan dan Minuman Tamu	12 Bulan		Belanja makanan dan Minuman Tamu	0 Bulan	
		Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ seminar/lokakarya	12 Bulan		Belanja makanan dan Minuman Pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ seminar/lokakarya	0 Bulan	
		Belanja Pakaian Kerja	4 Stel		Belanja Pakaian Kerja	0 Stel	
		Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	12 Bulan		Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah	0 Bulan	

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
		Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	12 Bulan		Belanja perjalanan Dinas Luar daerah	0 Bulan	
		Belanja Tenaga Ahli	12 Bulan		Belanja Tenaga Ahli	0 Bulan	
<b>402,15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>						
402.40201.15.002	Kegiatan Penerapan SPIP	Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 Level	107.640.000	Level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor	3 Level	250.000.000
		FGD Peningkatan SPIP	1 kali		FGD Peningkatan SPIP	1 kali	
		Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali		Sosialisasi penyampaian hasil penilaian maturitas	1 kali	
		Survey kepuasan stakeholder	1 kali		Survey kepuasan stakeholder	1 kali	
		Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4 kali		Pendampingan perwakilan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat	4 kali	
		Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah	36 PD		Pembinaan Penerapan SPIP pada perangkat daerah	36 PD	
		Tim satgas SPIP Kota Bogor	15 Orang		Tim satgas SPIP Kota Bogor	15 Orang	
402.40201.15.004	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Monitoring	2 Lap	20.800.000	Laporan Hasil Monitoring	2 Lap	150.000.000
		Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	5 Buku		Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD	5 Buku	
		Pendampingan Reviu	2 Kali		Pendampingan Reviu	2 Kali	
		Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	8 Buku		Buku Laporan Hasil Reviu LKPD	8 Buku	
402.40201.15.013	Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan kinerja	8 PD	132.550.000	Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan kinerja	8 PD	225.000.000

**RENCANA KERJA 2020  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
		Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan tujuan tertentu / probity audit	8 PD		Jumlah Laporan PD yang di lakukan pemeriksaan tujuan tertentu / probity audit	8 PD	
		Jumlah PD yang di lakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 PD		Jumlah PD yang di lakukan Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran dan barang jasa	37 PD	
		Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi)	3 Lap		Jumlah Laporan PD yang di lakukan monitoring (pembangunan, dana bos, aksi pencegahan korupsi)	3 Lap	
		Jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Menpan, Mendagri	12 PD		Jumlah Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Menpan, Mendagri	12 PD	
		Jumlah PD yang di lakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar)	37 PD		Jumlah PD yang di lakukan pembinaan / pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar)	37 PD	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	12 Kali	
		Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pemantauan TL		Jumlah pemantauan tindak lanjut	8 Pemantauan TL	
402.40201.	Kegiatan Peningkatan	1. Terlaksananya Bimtek	2 Kali	91.022.000	1. Terlaksananya Bimtek	2 Kali	400.000.000

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2020			PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021		
		Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp.)
15.012	Kapabilitas APIP	2. Terlaksananya PPSDAM	9 Kali		2. Terlaksananya PPSDAM	12 Kali	
402.40201.15.008	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	1. Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	36 PD	185.460.000	1. Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK	36 PD	120.000.000
		2. Terlaksananya monitoring RADPPK	4 Kali		2. Terlaksananya monitoring RADPPK	4 Kali	
		3. Terlaksananya penilaian internal ZI	1 Kali		3. Terlaksananya penilaian internal ZI	1 Kali	
		4. Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan	3 Kali		4. Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan	3 Kali	
		5. Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2 Kali		5. Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2 Kali	
		6. Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	1 Kali		6. Terlaksananya Monitoring dan Hasil Evaluasi Penilaian mandiri RB	1 Kali	
<b>402,17</b>	<b>PROGRAM PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>						
402.40201.17.001	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya reuiu laporan kinerja	1 PD	38.944.000	1. Terlaksananya reuiu laporan kinerja	1 PD	-
		2. Jumlah PD yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 PD		2. Jumlah PD yang dievaluasi Laporan Kinerjanya	36 PD	
		3. Jumlah Monitoring Kinerja	36 PD		3. Jumlah Monitoring Kinerja	36 PD	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2.819.216.000</b>			<b>1.263.815.000</b>

# BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### PERANGKAT DAERAH

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### Program dan kegiatan

Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2020 meliputi pelaksanaan 5 (lima) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.819.216.000,- dimana Inspektorat Daerah mendukung perencanaan Pemerintah Kota Bogor dalam urusan/bidang urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, Bidang Urusan Pengawasan. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
4	<b>URUSAN : PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	
402	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH : PENGAWASAN</b>	
<b>402.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	
402.40201.02.001	Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor	216.960.000
402.40201.02.006	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	388.000.000
<b>403.18</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	
403.40201.18.006	Kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT	118.815.000
<b>402.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	
402.40201.01.001	Kegiatan Pengelolaan Rumah tangga PD	1.519.025.000
<b>402.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	
402.40201.15.002	Kegiatan Penerapan SPIP	107.640.000
402.40201.15.004	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	20.800.000
402.40201.15.013	Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala	132.550.000
402.40201.15.012	Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP	91.022.000
402.40201.15.008	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB	185.460.000
<b>402.17</b>	<b>PROGRAM PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI</b>	
402.40201.17.001	Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.944.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.819.216.000</b>

Dari tabel di atas terdapat beberapa hal yang perlu diuraikan, sebagai berikut :

**I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :**

1. Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.216.960.000,-. Kegiatan ini mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di Tahun 2020 dengan target capaian sebesar 100%. Adanya peningkatan kebutuhan anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan karena kebutuhan mendesak Inspektorat akan sarana mobilitas penunjang pelaksanaan pengawasan. Target capaiannya sebesar 100%, Kegiatan ini mempunyai keluaran tersedianya sarana dan prasarana aparatur Inspektorat Daerah Kota Bogor berupa :
  - Pendingin Ruangan (AC) 3 Unit
  - Kursi Sice 1 Unit
  - Front Office Kit 1 Paket
  - Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit
  - Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Unit
  - Lemari Buku Pejabat Eselon II 1 Unit
  - Kamera DSLR 1 Unit
  - Microphone Meja Wireless Set 1 Paket
  - Alat Ukur Jarak Digital 2 Unit
  - Sigmat Digital 2 Unit
  - Lemari Penyimpanan Elektronik (Dry Cabinet) 1 Unit
  - Sound system Rapat 1 Paket
- Papan Nama Instansi 2 Unit
2. Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor, Kegiatan ini mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah di Tahun

2020 dengan target capaian sebesar 80%. Perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp.388.000.000,. Hal ini karena bertambahnya inventaris kantor yang perlu adanya pemeliharaan, yaitu untuk Kendaraan Bermotor dan Penggantian Suku Cadang, Komputer, Laptop, Printer, CCTV, AC, Mesin Pencacah, Mesin Tik, Bangunan Gedung Kantor, Sound System/Sarana dan Prasarana Inspektorat, dengan rincian :

- Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 10 Unit Kendaraan
- Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 10 Unit Kendaraan
- Belanja STNK Kendaraan Bermotor Roda 2 11 Unit Kendaraan
- Belanja Pemeliharaan AC 13 Unit AC
- Belanja Pemeliharaan Mesin Pencacah 11 Unit
- Belanja Pemeliharaan Mesin Tik Elektrik 1 Unit
- Belanja Pemeliharaan Sound System 5 Unit
- Belanja Pemeliharaan Komputer 16 Unit
- Belanja Pemeliharaan Laptop 27 Unit
- Belanja Pemeliharaan Printer 22 Unit
- Belanja Pemeliharaan CCTV 1 Set
- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Gedung
- Belanja Operasional Jaringan Listrik 1 Set

Kegiatan ini mempunyai output Inventaris kantor yang terpelihara (%). Dengan target capaian sebesar 100%.

**II. Program Pengembangan Data dan Informasi**, dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT, Kegiatan ini mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Prosentase PD yang menyediakan data dan informasi melalui media elektronik di Tahun 2020 dengan target capaian sebesar 60%, Prosentase data dan Informasi pembangunan yang dapat

diakses oleh publik melalui media elektronik dengan target capaian sebesar 60% dan Persentase Ketersediaan Data dan Informasi sesuai Kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dengan target capaian di Tahun 2020 sebesar 90%. Jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.118.815.000,, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Pengawasan yang berbasis Informasi Teknologi yang mendukung Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor.

**III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Rumah Tangga PD, Kegiatan ini mendukung Indikator Kinerja Program yaitu Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah sebesar 100% Kegiatan ini mempunyai output Terpenuhinya kebutuhan pegawai inspektorat Kota Bogor selama 12 bulan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah (Honor pegawai non ASN, Alat Tulis Kantor, Barang cetakan, Alat listrik & elektronik, Peralatan kebersihan, Biaya telepon, Surat Kabar, Belanja Makan Minum untuk mendukung seluruh Kegiatan di Inspektorat, Biaya Perjalanan Dinas untuk mendukung seluruh Kegiatan di Inspektorat, BBM, PDH) (Bulan). Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.519.025.000, dengan perkiraan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 100 %.

**IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan kegiatan :

1. Penerapan SPIP, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.107.640.000,, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output :
  - Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor mencapai Level 3
  - FGD Peningkatan SPIP sebanyak 1 Kali
  - Sosialisasi Penyampaian Hasil Penilaian Maturitas sebanyak 1 Kali

- Survey Kepuasan Stakeholder sebanyak 1 Kali
  - Pendampingan Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 Kali
  - Pembinaan Penerapan SPIP pada Perangkat Daerah sebanyak 36 PD
  - Tim Satgas SPIP Kota Bogor sebanyak 15 Orang
2. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.20.800.000,-, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output :
- Laporan Hasil Monitoring 2 Laporan
- Buku Laporan Hasil Kegiatan Reviu LKPD sebanyak 5 Buku
  - Pendampingan Reviu sebanyak 2 Kali
  - Buku Laporan Hasil Reviu LKPD sebanyak 8 Buku
3. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.185.460.000,-, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output :
- Jumlah PD yang dibina untuk penilaian WBK 36 Perangkat Daerah Terlaksananya monitoring RADPPK sebanyak 4 kali
  - Terlaksananya penilaian internal ZI sebanyak 1 kali
  - Terlaksananya penanganan pengendalian gratifikasi, WBS, benturan kepentingan sebanyak 3 kali
  - Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB sebanyak 2 kali
  - Terlaksananya monitoring dan hasil evaluasi penilaian mandiri RB sebanyak 1 kali
4. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.91.022.000,-, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output :
- Terlaksananya Bimtek sebanyak 2 kali
  - Terlaksananya PPSDAM sebanyak 9 kali

5. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala, jumlah kebutuhan anggaran sebesar Rp.132.550.000,-, kegiatan ini memiliki target capaian 100% dengan output :
- Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Kinerja sebanyak 8 laporan
  - Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pemeriksaan Audit Probitas sebanyak 8 laporan
  - jumlah perangkat daerah yang dilakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran, penyerapan anggaran barang dan jasa sebanyak 36 perangkat daerah
  - jumlah pendampingan yang dilakukan monitoring (pembangunan, dana BOS, aksi pencegahan korupsi) sebanyak 3 laporan
  - jumlah pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Kemenpan, Kemendagri sebanyak 12 kali
  - Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan/pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran barang dan jasa sebanyak 36 Perangkat Daerah
  - Ditindaklanjutinya pengaduan masyarakat sebanyak 12 Pengaduan
  - Jumlah pemantauan tindak lanjut sebanyak 8 kali

**V. Program Penerapan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan :**

1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini mempunyai target indikator kinerja program Prosentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB" sebesar 67,56% sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bogor sebanyak 1 Laporan Hasil Reviu
  - Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi Laporan Kinerjanya sebanyak 36 Perangkat Daerah
  - Jumlah Monitoring Kinerja sebanyak 36 Perangkat Daerah

**RENCANA KERJA 2020**  
**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.38.944.000,

Tabel 4.2  
 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

<b>Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>				
<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>		<b>Kegiatan</b>	
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan inspektorat	1	Program 1.1.2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Kegiatan 1.1.2.1 : Pengadaan Inventaris Kantor
			2	Kegiatan 1.1.2.2 : Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor
	2	Program 1.1.3 : Pengembangan Data dan Informasi	3	Kegiatan 1.1.3.1 : Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis IT
	3	Program 1.1.4 : Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	Kegiatan 1.1.4.1 : Pengelolaan Rumah tangga PD
	4	Program 1.1.5 : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5	Kegiatan 1.1.5.1 : Peningkatan Kapabilitas APIP
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		Program 1.2.1 : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6	Kegiatan 1.2.1.1 : Penerapan SPIP
			7	Kegiatan 1.2.1.2 : Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			8	Kegiatan 1.2.1.3 : Pengawasan Internal Secara Berkala
			9	Kegiatan 1.2.1.5 : Pembangunan Zona Integritas, WBK dan RB
	5	Program 1.2.2 : Penerapan Reformasi Birokrasi	10	Kegiatan 1.2.2.1 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

# BAB V

# PENUTUP

## BAB V PENUTUP

Rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengakomodir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan di Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Harapan kami, RENJA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2020, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2020 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di Kota Bogor dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Bogor.

**INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR.**



**Drs. Pupung W. Purnama, M.Si**  
Pembina Tk. I / IVb  
NIP. 19700715 199009 1 002

# RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020



BOGORBERLARI

